

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

Oleh:

Paramitha Sandy Mokodompit¹**Sifrid S. Pangemanan²****Inggriani Elim³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manadoemail: ¹ mokodompit_mitha92@yahoo.com² psifrid@yahoo.com³ e_inggriani@yahoo.com**ABSTRAK**

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, dan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya, masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

Kata kunci: rasio keuangan, kinerja keuangan

ABSTRACT

Performance measurement is a method or device used to record and assess the implementation of activities based on the achievement of goals, objectives, and strategies. Performance measurement can be known through the organization progress, as well as improve the quality of decision making, and includes accountability. Purpose of this study to determine the financial performance Kotamobagu City government, the research was conducted in the mayor's office and the data used is quantitative data in the form of Budget Realization Report (LRA). Method used is descriptive quantitative method, to measure financial performance through financial ratios. Result of the study showed, the ratio of the degree of decentralization of financial performance, is still lacking, the ratio of area of financial dependence on the central government and provinces is still very high, as well as the independence ratio is still very low. Advice to the government of as much Kotamobagu increase revenue through receipts taxes and levies.

Keywords: financial ratios, financial performance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategik planning. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui konsisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Mahmudi (2010:142) analisis rasio keuangan terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Bahwa maksud dari pembentukan kota Kotamobagu diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Luas wilayah kota Kotamobagu yang sebesar 68,06 Km² terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kotamobagu Utara, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Selatan dan Kecamatan Kotamobagu Barat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu dengan menggunakan rasio keuangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah Kota Kotamobagu, khususnya pada tahun anggaran 2011 dan 2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi ialah seni mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat dinancial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Warren (2008:10) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Mardiasmo (2009:3) organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan *turbulence*. Komponen lingkungan yang mempegaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Konsep Dasar Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2013:25) kinerja bisa diketahui hanya jika individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Elemen pokok dalam pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.

3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Fokus Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2013:29) pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya kongkrit dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Indikator dan ukuran kinerja financial dan non financial untuk target-target operasional tertentu memberikan garis pedoman (*guidelines*) bagi manajemen menengah dan bawah. Hasil aktual yang dicapai untuk setiap indikator dan ukuran yang terpilih. Review hasil aktual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya (*feedback*).

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Mahsun (2013:31) oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, tidak hanya tingkat efisiensi dan juga tidak hanya ukuran financial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain: (1) kelompok masukan (*input*); (2) kelompok proses (*process*); kelompok keluaran (*output*); kelompok hasil (*outcome*); (5) kelompok manfaat (*benefit*); kelompok dampak (*impact*).

Peran Indikator Kinerja

Mahsun (2013:128) rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah jelas oleh *stakeholders*. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkah kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian, tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil dimasa mendatang.

Rasio Keuangan Sebagai Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010:142), analisis rasio keuangan terdiri dari:

1. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keuangan Daerah

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat +Provinsi}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

1. Punu (2008) dengan judul analisis laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil kinerja pembangunan provinsi sulawesi utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikator untuk mengevaluasi hasil kinerja pembangunan provinsi. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Sulawesi utara lebih banyak menggunakan dana yang tersedia untuk aktivitas operasi dibanding aktivitas pembangunan.

2. Talamati (2008) dengan judul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota kotamobagu pada masa otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian kota kotamobagu pada tahun 2007-2009, untuk menganalisis perkembangan efektivitas kota kotamobagu pada tahun 2007-2009, untuk menganalisis perkembangan efisien kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009. Metode yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009 masih sangat rendah, rasio efektivitas kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009 belum efektif. Dan rasio efisien kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009 sudah efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian statistika deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kota Kotamobagu pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah pada bidang akuntansi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mengumpulkan teori pendukung
4. Menarik kesimpulan dan saran atas hasil analisis tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Kuncoro (2009:145) jenis data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang dapat diukur dengan skala numerik.
2. Data kuantitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran.

Sumber Data

Kuncoro (2009:148) sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer. Data primer biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.
2. Data sekunder. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa gambaran umum Kota Kotamobagu dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 dan 2012.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Studi lapangan, melakukan penelitian ke kantor pemerintah kota Kotamobagu dan mewawancarai langsung kepada bidang akuntansi dalam guna untuk mendapatkan Laporan Realisasi Anggaran. Data tersebut diperoleh dari dinas pendapatan, keuangan dan asset daerah (DPPKAD).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah kota Kotamobagu adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011 dan 2012. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, namun komponen dalam LRA yang digunakan hanyalah Pendapatan Daerah. Untuk mengukur kinerja keuangan tersebut digunakan perhitungan rasio keuangan.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi, Total Pendapatan Daerah, Belanja, Total Belanja.

Rasio Keuangan	2011	2012
Pendapatan Asli Daerah	9.355.251.155	11.188.179.886
Transfer Pemerintah Pusat	325.566.748.616	344.427.017.991
Transfer Pemerintah Provinsi	9.179.875.157	11.364.523.826
Total Pendapatan Daerah	398.888.262.348	366.979.721.703
Belanja	264.029.843.119	280.304.318.884
Total Belanja	380.609.742.183	367.995.280.935

Sumber: Pemerintah Kota Kotamobagu, 2014.

Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2011 pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi mengalami kenaikan pada tahun 2012, tetapi total pendapatan daerahnya menurun, yang awalnya pada tahun 2011 adalah 398.888.262.348 menurun menjadi 366.979.721.703. Realisasi anggaran belanja pada tahun 2011 meningkat pada tahun 2012, akan tetapi total belanja mengalami penurunan, pada tahun 2011 adalah 380.609.742.183 menurun pada tahun berikutnya menjadi 367.995.280.935.

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Keuangan	2011 (%)	2012 (%)
Rasio Derajat Desentralisasi	2,345	3,029

Sumber: Data olahan, 2014.

Perhitungan kinerja keuangan melalui derajat desentralisasi, di dapat 2,345% pada tahun 2011 dan 3.029% pada tahun 2012. Derajat desentralisasi kota Kotamobagu meningkat dari tahun 2011 ke tahun 2012, akan tetapi derajat desentralisasi kota Kotamobagu masih sangat rendah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keuangan Daerah

Tabel 3. Hasil Perhitungan Dengan Menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	2011 (%)	2012 (%)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	90,69	96,95

Sumber: Data olahan, 2014.

Ketergantungan keuangan daerah kota Kotamobagu masih sangat tinggi terhadap pendapatan yang pemerintah pusat dan provinsi. Bisa dilihat dari analisis rasio ketergantungan keuangan, ketergantungan pemerintah kota Kotamobagu terhadap pemerintah pusat dan provinsi adalah 90,69% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 adalah 96,95%.

3. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan transfer pusat ditambah dengan transfer provinsi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	2011 (%)	2012 (%)
Rasio Kemandirian Daerah	9,179	11,364

Sumber: Data olahan, 2014.

Tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun 2011 adalah 9,179% sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 11,369. Meskipun meningkat, tetapi tingkat kemandirian kota Kotamobagu masih sangat rendah, itu juga yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Pembahasan

Perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun anggaran 2011 kemampuan pemerintah kota Kotamobagu menjalankan proses desentralisasi daerah hanya sekitar 2.345% dan sisanya 97,655% berarti pemerintah kota Kotamobagu masih belum bisa menjalankan proses desentralisasi daerah. Begitu juga dengan tahun anggaran 2012, hasil perhitungan derajat desentralisasi pemerintah kota Kotamobagu hanya 3,029%. Berarti pada tahun 2012 kota Kotamobagu memiliki 96,971% kemungkinan proses desentralisasi daerah kota Kotamobagu tidak bisa berjalan. Proses desentralisasi kota Kotamobagu sangat rendah karena kota Kotamobagu baru saja terbentuk menjadi kotamadya.

Perhitungan diatas dapat dilihat bahwa ketergantungan keuangan daerah kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 adalah 90,69% sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 96,95%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat dan provinsi masih sangat dominan dalam ketergantungan keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah membiayai sendiri. Seperti yang bisa dilihat dari hasil perhitungan diatas, bisa dilihat bahwa tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 adalah sebesar 9,179% dan tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar 11,364%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 dan 2012 masih rendah sekali.

Pada peneliti sebelumnya Talamati (2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009 masih sangat rendah, rasio efektifitas kota Kotamobagu belum efektif, tetapi rasio efisien kota Kotamobagu pada tahun 2007-2009 sudah efisien. Dan Punu (2008), dalam penelitiannya pada pemerintah Sulawesi Utara, lebih banyak menggunakan dana yang tersedia untuk aktivitas operasi dibanding aktivitas pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

Kemampuan desentralisasi kota Kotamobagu pada tahun anggaran 2011 dan 2012 masih sangat rendah yang berarti masih belum mampu untuk menjalankan proses desentralisasi. Keuangan pemerintah kota Kotamobagu masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2011 dan 2012 masih sangat rendah.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Pemerintah kota Kotamobagu sebaiknya dapat meningkatkan PAD, melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah. Agar pemerintah dapat menjalankan proses desentralisasi, tidak terlalu bergantung soal keuangan kepada pemerintah pusat dan provinsi, serta tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kotamobagu dapat meningkat. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kota Kotamobagu tidak akan terlaui bergantung kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tetapi bukan berarti kota Kotamobagu tidak membutuhkan lagi dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena bantuan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.
2. Penulis menyarankan untuk dapat melakukan penelitian tentang kinerja keuangan di instansi pemerintahan yang lain untuk kemudian dapat dibandingkan sehingga menjadi masukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahsun. Muhamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik..* Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24 tentang, *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71 Tahun tentang *Standart Akuntansi Keuangan*.
- Punu, Meifa Julia. 2008. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mengevaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 9-11
- Talamati, Eka Sari. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Pada Masa Otonomi Daerah. *Skripsi* (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal. 45-49
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2007 No.4 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu.
- Warren. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.